

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009)
- Henry Campbell, Black's Law Dictionary, (St. Paul: West Publishing Co., 1910)
- Indroharto, Asas-Asas Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah AUPB, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004)
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005)
- Lawrence M. Friedman, American Law: an Introduction Terjemahan Wisma Bhakti, (Jakarta: Tata Nusa, 2001)
- L. J. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)
- Miriam Budiarjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Nico Ngani, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta, Pustaka Yustisia, 2012)
- Parjudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)
- Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, "Kajian Akademik: Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pelaksanaanya", (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022)
- Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),

Teguh Prasetyo, *Teori Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2022)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti, 1986)

Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jurnal

Agus Suryono, “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”, *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. VI No. 02 2014

Armin Hasti, dkk, “Kewenangan BPKM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj, Volumen 5 No. 2 (2023), July-December 2023

J. Ronald Mawuntu, “Konsep Penguasaan Negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum Unstrat, Vol. 20 No. 3, Juni 2012

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justicia, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII (september-desember, 1997)

Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3, September 2019

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-1/2003

Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/TUN/2023 tanggal 27 November 2023

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juni 2023

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 300/G/2022/PTUN.JKT tanggal 2 Februari 2023.

Website

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Teguh Paparkan Teori Keadilan Bermartabat Dalam Sekolah Kepemiluan GAMKI”, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/> (diakses tanggal 7 Mei 2025)

Edi Suwiknyo, “Menteri Bahlil Kalah Lagi Lawan Perusahaan Nikel di PTUN Jakarta”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230218/16/1629413/menteri-bahlil-kalah-lagi-lawan-perusahaan-nikel-di-ptun-jakarta> diakses pada 30 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/martabat> diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wenang> diakses pada tanggal 1 Juni 2025

Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik, “Seri Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook Triwulan-III 2024” LPEM FEB Universitas Indonesia, <https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/08/IEO-Q3-2024-ID.pdf> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Siaran Pers Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor 45.Pers/04/SJI/2024, “Sektor Pertambangan Serap 300 Ribu Tenaga Kerja di 2023”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sektor-pertambangan-serap-300-ribu-tenaga-kerja-di-2023> diakses tanggal 30 Oktober 2024.

